

Jakarta -- Rencana pemindahan ibu kota makin nyata. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir pidato kenegaraannya Jumat (16/8) lalu.

Sebelum menutup pidato Jokowi meminta izin kepada semua peserta sidang dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Namun Jokowi tidak spesifik menyebut kota di Kalimantan yang akan menggantikan Jakarta.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.

Meski belum menentukan lokasi ibu kota baru, pernyataan Jokowi di depan wakil rakyat diramal akan memberikan angin segar bagi emiten sektor infrastruktur. Sebab, pemindahan ibu kota dipastikan akan disertai dengan pembangunan infrastruktur penunjang yang bisa memberikan berkah kepada emiten sektor tersebut.

Pendiri LBP Institute Lucky Bayu Purnomo mengatakan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor infrastruktur bakal terdongkrak dengan program pemindahan ibu kota. Saham yang bisa mendapatkan imbas tersebut antara lain, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk.

"Seperti tahun 2014, ketika infrastruktur menjadi unggulan. Pada kenyataannya pemerintah betul-betul menaruh dukungan penuh kepada infrastruktur melalui emiten tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Pernyataan Lucky sejalan dengan rancangan pendanaan pembangunan ibu kota. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mencapai Rp93 triliun dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp323 triliun sampai Rp466 triliun.

Sementara sisanya, ditutup oleh skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), baik BUMN maupun swasta. Itu berarti, BUMN dan swasta akan memainkan peran besar dalam mega proyek itu.

Lucky meyakini kepastian itu akan mendorong kinerja saham-saham tersebut. Jika dicermati, harga saham empat BUMN karya itu naik hingga mendekati level tertinggi sejak awal tahun pada April.

Kenaikan tersebut bertepatan dengan kembali mencuatnya wacana pemindahan ibu kota. Namun, saham tersebut kembali bergerak fluktuatif pada bulan berikutnya.

Saham Adhi Karya menyentuh level Rp1.800 pada Kamis (18/4) mendekati level tertingginya di Rp1.810 pada Rabu (16/1). Pada penutupan perdagangan Jumat (16/8) saham dengan kode

ADHI itu berada di posisi Rp1.390 naik 0,72 persen. Sedangkan sejak awal tahun saham ADHI turun 12,3 persen.

Lalu, saham Waskita menyentuh level Rp2.170 pada Senin (29/4) mendekati level tertingginya di Rp2.180 pada Rabu (17/7). Pada penutupan perdagangan Jumat (16/8) saham dengan kode WSKT itu berada di posisi Rp1.815 turun 1,63 persen. Sedangkan sejak awal tahun saham WSKT menguat 8,04 persen.

Untuk saham Wijaya Karya menyentuh level Rp2.470 pada Senin (29/4) mendekati level tertingginya di Rp2.490 pada Rabu (17/7). Pada penutupan perdagangan Jumat (16/8) saham dengan kode WIKA itu berada di posisi Rp2.280 turun 2,15 persen. Sedangkan sejak awal tahun saham WIKA menguat 8,04 persen.

Lebih lanjut, saham PP menyentuh level Rp2.490 per saham pada Kamis (18/4) yang merupakan level sejak awal tahun. Pada penutupan perdagangan Jumat (16/8) saham dengan kode PTPP itu berada di posisi Rp1.910 turun 0,52 persen. Sedangkan sejak awal tahun saham PTPP menguat 37,76 persen.

Ia meramalkan kepastian pemindahan ibu kota lewat pidato Jokowi akan kembali mendongkrak saham perusahaan plat merah tersebut. Ia merekomendasikan beli untuk saham ADHI dengan target harga Rp1.470 per saham, WSKT Rp2.025 per saham, WIKA Rp2.475 per saham dan PTPP Rp2.080 per saham.

Di sisi lain, kinerja saham sektor ini memang cukup kinclong. Jika dilihat dari kinerja saham sejak awal tahun, tiga saham BUMN karya berhasil menyalip pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tercatat sebesar 1,49 persen. Hanya saham ADHI yang tercatat melemah.

"Sektor infrastruktur memang rata-rata bergerak di atas IHSG," imbuhnya.

Analisis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan menambahkan nilai proyek yang fantastis tentunya akan membawa berkah bagi sektor infrastruktur. Emiten yang diuntungkan dari proyek itu tentunya emiten yang dipercaya membangun sarana dan prasarana penunjang di ibu kota baru.

Pemerintah sendiri telah merancang peta jalan pemindahan ibu kota. Tahun ini, pemerintah akan menentukan lokasi ibu kota. Sedangkan tahun depan, pemerintah akan merampungkan *master plan* (rancangan) infrastruktur dasar.

Setelah itu, mereka akan melakukan *groundbreaking* (peletakan batu pertama) di 2021, dan proses pemindahan dimulai pada 2024.

"Kami belum bisa memastikan secara rinci emiten mana yang akan diuntungkan. Karena master plan juga baru jadi di tahun 2020," tuturnya.

Meski demikian, ia menilai *holding* BUMN konstruksi memiliki peluang terbesar untuk mendanai skema KPBU yang dimaksudkan pemerintah. Pasalnya, setelah

pembentukan *holding* BUMN konstruksi posisi keuangan akan sangat kuat.

"Sehingga akan mudah untuk masuk ke proyek-proyek besar seperti ini," ujarnya.

Untuk diketahui, holding BUMN infrastruktur terdiri dari 6 perusahaan dengan PT Utama Karya (Persero) sebagai induk holding. Sedangkan anggota holding yakni, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Selain perusahaan tercatat, anggota holding BUMN infrastruktur adalah PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).

Jasa Marga, Adhi Karya, dan Waskita Karya telah mengantongi restu pemegang saham untuk mengubah Anggaran Dasar (AD) sehubungan dengan rencana pembentukan *holding*. Dengan perubahan anggaran dasar, maka tiga perusahaan plat merah tersebut siap melepas status perseronya.

Saat ini, holding infrastruktur tengah menunggu Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Utama Karya terbit.

Dari sisi kinerja keuangan, Adhi Karya berhasil unggul ketimbang Waskita Karya pada semester I 2019. Laba Adhi Karya naik 1,08 persen secara tahunan dari Rp212,7 miliar menjadi Rp215 miliar. Namun, pendapatannya turun 10,79 persen dari Rp6,08 triliun menjadi Rp5,42 triliun.

Sementara itu, laba Waskita Karya anjlok 66,63 persen dari Rp2,99 triliun menjadi hanya Rp997,82 miliar. Penurunan laba dipicu penurunan pendapatan perseroan sebesar 35,39 persen dari Rp22,89 triliun menjadi Rp14,79 triliun.

Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT PP (Persero) Tbk menjadi anggota holding BUMN perumahan dan pengembangan kawasan. Holding ini akan dinahkodai oleh Perum Perumnas.

Selain Wijaya Karya dan PP, anggota lainnya adalah PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), dan PT Bina Karya (Persero). Namun, hingga saat ini rencana holding BUMN perumahan belum tuntas.

Dari sisi kinerja, Wijaya Karya mengantongi kenaikan laba bersih 72,23 persen secara tahunan dari Rp517,25 miliar menjadi Rp890,88 miliar. Akan tetapi, Wijaya Karya juga mencatat penurunan pendapatan sebesar 12,43 persen dari Rp12,97 triliun menjadi Rp11,36 triliun.

Sementara itu, PP menjadi satu-satunya BUMN karya yang menorehkan penurunan laba. Pada semester I 2019, laba perseroan turun 24,25 persen dari Rp479,75 miliar menjadi Rp363,37 miliar. Namun, realisasi pendapatan naik 12,8 persen dari Rp9,5 triliun menjadi Rp10,72 triliun.

Penurunan pendapatan mayoritas BUMN karya disebabkan banyak proyek pembangunan infrastruktur yang selesai pada 2018, sehingga mengurangi pendapatan perseroan di enam bulan

pertama tahun ini. Dengan demikian, proyek pemindahan ibu kota ini diyakini bisa menggairahkan kembali kinerja perseroan melalui kontrak-kontrak baru.